

Peran Botoh dalam Pemilihan Kepala Desa: Studi Konflik Politik Kepala Desa Sotabar, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan

M. Fachri Ilham Akbar^{1*}, Aribowo²

^{1,2}Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Airlangga

*E-mail: fachriilham11@gmail.com

Abstract: Botoh (voice brokers) in the areas of Central Java and East Java have an important role in winning the candidates carried out in the lowest level general elections (pilkades). Solid strategies in the selection of candidates are not responsible for the method of funding, surveying, and control of dominance held in the image of society. General Election of Village Heads in Sotabar Village, Pasean Subdistrict, Pamengkasan Regency is an arena for strong power shows in winning the candidates they carry. Many conflicts occur in the pilkades because of differences of opinion, struggles for power and interests. Between the election of village heads (pilkades) and the political dynamics between botoh, petahanats and the community. The findings of the data show that Botoh has an important role associated with the search for candidates to win. In addition, botoh is a person who has the legitimacy of power in society, the experience of freedom in the world of photography and high relations with political officials. When political practices were implemented, Botoh implemented mobilization by reading the conditions of the community and carried out carefully in the three groups approved by the clerics, santri and abangan through the team provided. Even in the winning process, it is through some political dynamics with other actors that cause conflict. This conflict is triggered by the relationship between slaughterhouse and petahanat related to unbalanced authority and leadership that is not in line with the expectations of the community.

Keywords: *Botoh, conflict, petahana, election, mobilization, political dynamics*

PENDAHULUAN

Botoh (makelar suara) sudah tidak asing didengar oleh masyarakat menjelang pemilihan umum (pemilu) di Indonesia. Keberadaan botoh menjadi sangat penting pada liga kontestasi politik terkait sebagai penentu suara dalam memenangkan calon Legislatif dan eksekutif. Di mana botoh menjadi sebuah agen makelar suara yang memiliki strategi khusus untuk mendapatkan suara pemilih dengan dilatarbelakangi keuntungan materi. Sehingga tidak heran, botoh menjadi penentu suara dan diburu oleh calon penghuni legislatif maupun eksekutif terkait dengan keberadaan botoh dalam liga kontestasi politik. Keberadaan botoh sudah tidak asing di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta di antaranya: Madura, Ponorogo, Sragen, Pati dan Yogyakarta. Sebagai negara penganut demonstrasi masyarakat Indonesia selalu melaksanakan pemilihan umum dalam tempo lima tahun sekali guna mendapatkan penghuni DPR, DPD, DPRD, Kepala Daerah, Bupati, Wali Kota, Gubernur dan Presiden. Selain itu pemilihan umum dilaksanakan pada tatanan terbawah, guna mendapatkan kandidat kepala desa sesuai dengan kehendak rakyat. Pelaksanaan pemilihan umum kepala desa (pilkades) diadakan secara langsung oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang diketahui langsung oleh Komisi Pemilihan.

doi:

Pemilihan umum (pemilu) negara demokrasi berguna sebagai pengatur, pemelihara dan penyeimbang politik. Selain itu, pemilihan umum dapat menyebabkan konflik yang berdampak pada perusak sistem politik dan tatanan negara. Sering kali, pemilihan umum disertai dengan konflik yang terjadi antara calon kandidat, pendukung dan pemilih. Konflik politik dalam pemilihan umum tidak terjadi hanya pada tatanan tertinggi seperti parlemen legislatif dan eksekutif, namun pada tatanan terendah seperti pemilihan umum kepala desa (pilkades). Kondisi ini memicu situasi yang mencekam dan tidak kondusif bagi para pemilih. Untuk memperkuat aturan tentang UU No.6 Tentang Desa, maka lahirlah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.112 Tahun 2014 yang secara khusus mengatur tentang pemilihan Kepala Desa. Dalam Permendagri No.112 Tahun 2014 terdapat beberapa hal yang sangat penting untuk dipahami yaitu pada pasal 2, 3 dan 5 menyebutkan bahwa pasal 2 menyatakan pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang, pasal 3 menyatakan pemilihan kepala desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten/Kota. Pasal 5 menyatakan bahwa Kabupaten/Kota melalui Bupati juga ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, yaitu dengan membentuk Panitia Pemilihan di tingkat Kabupaten. Selain itu, dalam peraturan juga menjelaskan tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan membentuk panitia pemilihan umum kepala desa. Dengan adanya Undang-undang Negara yang mengatur keberadaan pemilihan Umum Kepala Desa, maka tidak heran posisi kepala desa menjadi ajang kontestasi sengit para calon kandidat dan jajaran pendukungnya. Botoh tidak segan mengeluarkan dana yang tinggi untuk memenangkan para kandidat yang dijagokan. Di wilayah tertentu, para calon kandidat dengan pendukung mereka masing-masing memiliki strategi-strategi terhadap kemenangan yang didukung oleh botoh. Hal ini, tidak lain diketahui bahwa botoh memiliki kepercayaan tersendiri bagi masyarakat terkait dengan pemilihan terhadap kandidat.

Di wilayah Madura, botoh memiliki peran penting dalam memenangkan pemilihan umum terkait dengan riil massa yang dimiliki. Botoh mampu mengeluarkan dana yang tidak sedikit, demi memenangkan calon kandidat yang telah diusung. Dalam mendapatkan calon kandidat kepala desa, botoh melakukan survei jauh-jauh hari sebelum diadakan pemilihan umum kepala desa (pilkades) dengan waktu mencapai empat hingga enam bulan sebelumnya. Botoh mampu menyurvei eksibilitas calon yang akan didukung dan menekan tim yang akan mengambil andil dalam pilkades. Pada proses mencari kandidat kepala desa, botoh memiliki persyaratan khusus untuk calon kandidat yang akan diusung seperti harus memiliki riwayat baik didesa dan memiliki banyak teman serta kerabat diikat dalam keyakinan terhadap kandidat. Seperti yang dikatakan Ferdinand Tonnies yang berhubungan kekeluargaan yang sangat kuat ini berupa paguyuban (*gemeinschaft*) dan patembayan (*gesellschaft*) (Tonnies, 1887). Paguyuban (*gemeinschaft*) adalah salah satu iklim kehidupan yang terbentuk oleh hubungan-hubungan batin yang bersifat kekal dan natural. Seperti perasaan-perasaan yang bersifat natural atau inting seperti rasa cinta, kasih sayang yang bersifat kodrati. Sebaliknya, patembayan

doi:

(*gesellschaft*) sebuah ikatan yang dilakukan yang bersifat jangka pendek, seperti misalnya perjanjian, kontrak politik yang sifatnya ada timbal balik (Rohmawati, 2017).

Penelitian dan fenomena konflik botoh sudah banyak terjadi di wilayah Indonesia serta menjadi sebuah berita acara media cetak, televisi maupun media online. Sehingga dengan ini mampu menjadi sebuah penelitian terdahulu untuk memperkaya data penelitian ini. Terkait fenomena-fenomena botoh yang terjadi di beberapa Kabupaten, pada 12 Desember 2015 di Kabupaten Ponorogo terdapat hal serupa yaitu perjudian pilkades yang dilakukan oleh para botoh, dimana Ponorogo dikenal sebagai Las Vegasnya para pencari nafkah musiman (pejudi pemilihan kepala desa) dan berkumpulnya para botoh dalam ajang pemilihan kepala desa hingga Bupati. Seorang botoh yang memihak calonnya tidak segan-segan untuk menggelontorkan uangnya agar bisa memenangkan taruhan yang dilakukan antar penjudi atau antar botoh. Semakin tinggi nilai taruhannya serta semakin kuat pula figurinya maka akan semakin gencar pula money politik dan bahkan penjegalan terhadap calon yang tidak didukung oleh botoh. Hal ini lazim dilakukan karena untuk mengamankan uang taruhannya (Setiawan, 2016).

Kemudian terdapat pula fenomena pemilihan kepala desa yang dilakukan di Yogyakarta juga kurang lebih juga sama, terkait adanya praktik botoh yang berperan dalam pemilihan kepala desa. Masih dengan politik uang yang digunakan oleh calon kepala desa untuk mendapatkan suara yang signifikan. Namun, di Yogyakarta peran botoh di sini, sangat luar biasa. Botoh memiliki data rekap KTP masyarakat desa, jadi lebih mudah untuk memetakan suara yang kemudian ditawarkan kepada masyarakat maupun calon. Jual beli *photo copy* KTP pun tidak terelakkan. Proses yang dilakukan oleh botoh ini sangat terstruktur, karena melibatkan anak buah yang berada di setiap desa (Hamdani, 2017).

Kejadian serupa juga dialami oleh 11 desa di Kabupaten Karanganyar, para penjudi ini bermunculan untuk mendapatkan pundi uang dari hasil perjudian antar kepala desa. Botoh di sini seperti yang sudah diketahui tidak memikirkan visi dan misi calon, yang diutamakan adalah mengoptimalkan perolehan suara calon agar menang. Karena orientasinya hanya untuk memperkaya diri dengan menggunakan pilkades sebagai medan atau wadah taruhan. Seperti yang diketahui bersama, ajang pemilihan kepala desa adalah ajang untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. (Suryo, 2017).

Kemudian dua negara Amerika Latin yaitu Meksiko dan Brazil masih menerapkan dominasi kekuasaan yang dijalankan oleh wirausaha lokal dan regional yang dinamakan dengan *caciquismo* dan *coronelismo* dalam politik desa. Saat melaksanakan pemilihan umum, para masyarakat desa tidak mampu memberikan kehendak asli dan murni sesuai dengan keinginan dikarenakan kekuasaan yang dijalankan oleh *Caciquismo* (Meksiko) dan *Coronel* (Brazil). Dalam membangun para pengikut di desa, *Caciquismo* dan *Coronelismo* tak segan menerapkan pemaksaan dan kekerasan serta dominasi yang

doi:

dimiliki. Negara tak mampu untuk mengatasi problematika tersebut disebabkan hanya mampu memegang politik pusat kota tanpa politik terendah di level desa (Roniger, 2018). Relevansi dengan penelitian penulis terkait dengan adanya negara yang tak mampu mengatasi permasalahan di tingkat desa dikarenakan daya jangkau yang jauh dan rumit. Selain itu, dominasi yang dimiliki botoh tidak lain karena nama yang telah dikenal dan memiliki kekuasaan akan politik di tingkat desa, sehingga para masyarakat desa cenderung untuk mengikuti arahan yang telah diinstruksikan oleh botoh. Sedangkan pembaruan penelitian dengan botoh terkait dengan konflik dan kepercayaan para masyarakat terkait dengan politik yang dijalankan oleh botoh. Sehingga mampu membedakan peran botoh di Indonesia maupun botoh di luar negeri terkait dengan politik yang dijalankan.

Pemahaman tentang *brokerage* dan *partisanship* merupakan kedua belah pihak yang memiliki pengaruh besar terhadap politik Irlandia. Nilai-nilai tradisional budaya yang bertahan memunculkan klientelisme dari politik mesin yang sangat sempit. Politik kuno ini mengusung tentang kesetiaan partisanship dengan adanya sosialisasi kesetiaan guna menyusun sistem nasional persaingan partai yang disiplin (Carty, 2018). Relevansi dengan penelitian penulis terkait dengan hubungan botoh dan masyarakat desa yang masih menganut politik kuno yang sama. Selain itu, penelitian ini menjadi sebuah pembaruan terkait dengan kesetiaan para masyarakat terhadap botoh yang memiliki peran penting politik di desa. Pemilihan Lokasi di Desa Sotabar, Pamekasan, Madura merupakan realitas sosial yang ditemukan peneliti terkait dengan konflik yang terjadi pada beberapa tahun lalu antara botoh dan petahana. Dengan adanya fenomena konflik yang terjadi beberapa tahun lalu, terkait dengan pemilihan umum kepala desa Sotabar, Kabupaten Pamekasan. Maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian yaitu Bagaimana proses dinamika botoh dengan petahana dan masyarakat serta apa peran botoh dalam pemilihan kepala desa Sotabar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif guna mendapatkan data yang lengkap, mendalam dan membuka realitas tersembunyi terkait dengan konflik kepentingan antara botoh, petahana dan masyarakat. Pertimbangan lain terkait dengan fenomena botoh yang sangat familiar dengan peran yang dimiliki sangat dinamis. Selain itu, tawaran-tawaran yang menarik dari botoh membuat masyarakat meyakini pula kegiatan pemilihan umum merupakan cara instan dalam mengais rezeki. Lokasi di Desa Sotabar, Kabupaten Pamekasan menjadi sarana praktik botoh yang rutin dijalankan dalam pemilihan umum. Lokasi ini merupakan tempat menarik terkait dengan fenomena yang terjadi dengan peran botoh di Sotabar, Pamekasan. Subjek penelitian berjumlah lima informan diantaranya botoh (H. Kagik Martolo), Kepala Desa (Nasuki), BPD (Badan Pengawas Desa) (Abdul Muthalib), tokoh Masyarakat (K.H. Ali Dhofir) dan masyarakat. Pengumpulan data menggunakan data primer yaitu wawancara secara mendalam (*in-depth interview*), dokumen tertulis dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui penelitian terdahulu terkait dengan fenomena botoh.

doi:

Dalam praktik botoh kerap kali konflik-konflik tidak terelakkan, seperti konflik dengan calon kepala desa, atau pun dengan kelompok lain yang memiliki pengaruh yang sama, atau kekuatan yang sama. Tidak jarang juga, kemunculan konflik botoh ini dipengaruhi oleh, pelaksanaan kesepakatan politik yang dilakukan oleh botoh dan petahana, seperti yang terjadi pada Sotabar saat ini. Kesepakatan yang memicu konflik di desa Sotabar ialah pengelolaan tanah bengkok dan pemenuhan atas unit kepal yang sudah dijanjikan yaitu sebesar 200 unit. Tidak menutup kemungkinan dengan tidak mengakomodir kepentingan botoh ini, petahana tidak akan mendapat simpati lagi dari tangan dingin botoh.

Kemudian seturut dengan konflik, penulis juga menyinggung sedikit terkait mobilisasi dimana mobilisasi muncul akibat dari gerakan sosial yang dilakukan oleh pemimpin agar dapat mengendalikan masyarakat. Namun begitu timbul rasa ketidakpuasan pula akan muncul karena adanya kesadaran akan timbulnya ketidakadilan yang dipantik oleh tekanan dan diskriminasi yang dilakukan oleh penguasa. Perasaan ketidakpuasan akan muncul ketika harapan yang dijanjikan tidak sesuai dengan realitas yang ada. Menurut (McCarthy dan Zaid, 2009) aspek penting dalam mobilisasi seperti basis dukungan, strategi dan pendekatan. Pendekatan mobilisasi sumber daya yaitu mencari keberagaman sumber-sumber yang harus dimobilisasi dalam suatu gerakan sosial, keterkaitannya dengan kelompok. Mobilisasi ini muncul dari masyarakat karena merasa tidak puas, atau tidak terpenuhi suatu janji yang sudah diucapkan oleh penguasa.

Botoh sangat peduli terhadap calon yang akan diusung, karena bagaimanapun ia juga memikirkan investasi sosial maupun keuntungan materil. Untuk melanggengkan kekuasaan dibalik layar, Abah Kagik selaku botoh di Desa Sotabar dalam setiap gerakannya penuh dengan perhitungan. Sehingga saat kontestasi pemilihan umum kepala desa (pilkades) periode 2016 ini sangat dinamis, karena kemenangan yang didapat oleh Pak Nasuki melawan petahana Abdul Aziz Masyhuri cukup banyak yaitu selisih 382 suara. Dari jumlah penduduk 4.080 jiwa jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) 3.844 jiwa, perolehan Pak Nasuki sebagai penantang 2.293 suara dan Abdul Aziz Masyhuri sebagai petahana 1.529 suara, kemudian suara tidak sah ada 22 suara (hasil wawancara dengan BPD Abdul Muthalib).

Peran dan langkah politik yang ditempuh oleh botoh berbeda-beda, tergantung wilayah tempat bermain berada. Selain itu, sebutan botoh untuk setiap daerah tidak sama, sehingga tidak jarang botoh mampu bermain di tingkatan yang lebih tinggi seperti contoh pemilihan gubernur, pemilihan bupati maupun legislatif botoh turut serta andil bagian di dalamnya, supaya dapat melebarkan sayap serta menambah jam terbang botoh tersebut. Botoh tidak memiliki massa secara riil, namun botoh memiliki simpul-simpul seseorang yang dipercaya untuk mengelola konstituante sebagai alat jual belinya yaitu blater yang berkedudukan sebagai seorang tokoh masyarakat, di mana biasanya sesepuh desa atau tokoh agama yang memiliki banyak relasi jemaah, serta juga jawara yang ditakuti di desa. Cara-cara botoh

doi:

dalam memobilisasi sangat sederhana, hanya menginstruksikan pekerjaan apa yang harus dilakukan oleh blater tersebut. Karena memang telah tersistematisasi struktur yang dibuat oleh masing-masing botoh dengan dalil mempermudah kinerja dalam memperoleh data-data terbaru yang dibutuhkan dalam setiap kontestasi. Ada beberapa karakteristik yang lekat dengan botoh ini yang dijelaskan sebagai makelar suara, ia berperan memetakan pemilih dan dilatarbelakangi keuntungan materi yang akan didapatkan oleh makelar suara serta pemilih (Aspinall, 2014).

Tujuan botoh tidak hanya mencari limpahan materi saja, melainkan mampu mengoptimalkan legitimasi kepercayaan masyarakat di tingkat lokal. Strategi politik mempererat kepercayaan masyarakat yang dijalankan botoh menjadikan pihak botoh memiliki peran yang tinggi meskipun dalam kondisi kalah pemilihan umum. Botoh menjadi sebuah pengendali calon kandidat yang akan maju dan pengendali suara masyarakat pada ajang perebutan kursi politik di pemilihan umum kepala desa. Peran botoh dalam kontestasi pemilihan umum desa dirasa cukup besar terkait dengan pengusungan calon kepala desa yang tidak setengah-setengah. Botoh melakukan tugasnya dengan perhitungan yang matang dan tidak asal membantu demi mendapatkan keuntungan materiil dari calon yang dimenangkan nantinya (Aspinall, 2014).

Botoh menciptakan sebuah ruang tersendiri, di mana masyarakat dapat berpikir rasional dan mampu melihat realitas Sotabar yang kurang kondusif ketika dipimpin oleh petahana. Dengan adanya ruang terbuka menyelimuti pemikiran masyarakat Sotabar, botoh berupaya memanfaatkan kondisi ini untuk mendapatkan keuntungan dari polemik politik yang terjadi. Botoh membuka dimensi kepercayaan masyarakat terhadap kandidat baru yang dianggap layak untuk memimpin Sotabar ke arah yang lebih baik. Terdapat beberapa penelitian yang ditemukan bahwa botoh memiliki peran penting dengan menyurvei para calon kandidat yang akan ditawarkan ke hadapan masyarakat dan selanjutnya dicalonkan menjadi kepala desa.

Pada setiap wilayah dan daerah, botoh memiliki nama dan peran yang berbeda-beda. Antara botoh dan blater (anak buah botoh) harus mampu bekerja sama yang baik demi mencapai sebuah tujuan. Sehingga blater harus mampu menerjemahkan keinginan botoh. Dalam kontestasi pemilihan umum kepala desa (pilkades) instruksi yang diberikan terhadap blater di antaranya mencari data para calon yang akan diusung di hadapan masyarakat, probabilitas kemenangan yang akan dimenangi oleh calon tersebut, karena botoh tidak bermain dalam satu kaki dalam praktiknya. Karena setiap manuver yang akan dilakukan oleh botoh akan diperhitungkan masak-masak, karena setiap apa yang dikeluarkan botoh dari sakunya, harus kembali dan berkali-lipat. Ketika botoh memang benar-benar seorang yang pragmatis, maka keuntungan semata-mata yang hanya akan dipikirkan oleh botoh.

doi:

Dalam pemetaan suara, botoh sebagai konseptor dan pendana utama calon kepala desa maka saat menjalankan interaksi dengan blater, mengharuskan blater mampu memobilisasi masyarakat dengan bekal konsep yang telah diarahkan. Blater merupakan penyambung lidah botoh dengan masyarakat, blater turun langsung terhadap masyarakat untuk menawarkan usulan yang dihasilkan oleh botoh. Blater bertugas dalam meyakinkan masyarakat sesuai argumen-argumen yang rasional. Agar blater tetap digunakan jasanya oleh botoh, maka blater harus dapat menjaga kepercayaan botoh sesuai dengan arahan yang perintahkan. Peran botoh semakin melekat di kalangan masyarakat desa Sotabar Kabupaten Pamekasan karena pengalaman yang dimiliki sudah berjalan puluhan tahun. Selain itu, botoh yang memiliki legitimasi dan dipercaya masyarakat terkait dengan sepak terjang di dunia politik serta mengenal tokoh-tokoh besar di Pamekasan, Madura.

Pada pemilihan umum kepala desa Sotabar 2016, terdapat konflik antara botoh Abah Kagik dan petahana Abdul Aziz Masyhuri terkait dengan pembagian hasil yang dianggap kurang sesuai bagi petahana. Hal ini memicu petahana mencari botoh lain terkait dengan maju kontestasi selanjutnya. Begitu pula, Abah Kagik selaku botoh menyurvei dan mencari kandidat baru sesuai dengan pemimpin harapan masyarakat. Selanjutnya botoh menemukan calon kepala desa Pak Nasuki yang dianggap mampu menarik perhatian masyarakat dan lawan unggul dalam kontestasi politik melawan Abdul Aziz. Dengan kepercayaan masyarakat terhadap botoh terkait dengan calon yang diusung maka botoh optimis memenangkan kembali kandidat kepala desa 2016.

“Hubungan saya semakin memburuk karena perjanjian politik yang sudah dibuat diingkari gitu aja sama petahana, sebagai orang yang sakit hati. Ya saya menarik dukungan saya, dan gak mau membantu apapun yang dia minta dan butuhkan, yang paling kurang ajar itu dia diam-diam bermain dua kaki dengan botoh Lebak Barat, itu yang membuat saya tidak mau tau lagi apapun yang akan dilakukan olehnya untuk desa, ya karena saya merasa kecewa dengan orang yang tidak bisa mengindahkan kesepakatan,” (Abah Kagik, 2017)

Serangkaian dinamika yang terjadi dalam mobilisasi sangat berbeda-beda, persetujuan antara mereka berdua mengakibatkan botoh ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja botoh yang sempat tercederai oleh ulah petahana, karena sudah memilih bahkan menjadikan orang yang kurang tepat dalam menahkodai pemerintahan di Sotabar, serta berdinamika dalam tim botoh bagaimana cara untuk mengkonsep dan mempengaruhi pemilih agar sesuai dengan yang ia inginkan.

Perjalanan karir botoh pada dunia politik banyak mengalami dinamika konflik dengan calon kepala desa yang diusung. Seperti awal mula hubungan antara botoh dan petahana Desa Sotabar yang berjalan baik, namun dengan berjalannya waktu hubungan keduanya merenggang dan berubah menjadi konflik. Hal ini dimulai saat pencalonan awal petahana yang bernama Abdul Aziz Masyhuri dengan latar belakang pekerjaan sebagai seorang pedagang mebel, dan jual beli kayu di Pamekasan. Dengan latar belakang seorang yang dianggap sudah cukup mampu dalam perekonomian kala itu, maka botoh menawarkan kerja sama terkait dengan dicalonkannya Abdul Aziz Masyhuri sebagai kepala desa Sotabar 2011.

doi:

Dengan kondisi kerja sama yang telah terjalin antara keduanya maka saat itu pula mulai mencuat nama Abdul Aziz Masyhuri sebagai calon yang berasal dari Togur Laok daerah yang mayoritas mata pencaharian nelayan. Pada kala itu, hubungan antara Togur laok dan Labak Timur mengalami konflik atas sinyalir kultural yang sejak lama terjadi. Selain itu, konflik keduanya dipicu atas kebijakan anggaran acara di setiap dusun.

Petahana tidak hanya memiliki hubungan renggang dengan botoh saja, masyarakat Desa Sotabar juga memiliki hubungan tidak baik dengan petahana. Hal ini disinyalir atas terkontaminasi oleh isu-isu lama terkait dengan konflik antara Togur Laok dan Lebak Timor yang tidak mampu berdamai. Selain itu, petahana tidak mampu memenuhi janji yang telah disepakati ketika dirinya terpilih menjadi kepala desa. Janji ini berupa penambahan armada kapal laut untuk nelayan Togur Laok. Kedua permasalahan ini menjadikan ketidakpercayaan masyarakat terhadap petahana Abdul Aziz yang mengakibatkan konflik antara petahana dan masyarakat Desa Sotabar. Sebelumnya ketika pemilihan umum kepala desa Sotabar 2011 lalu, basis suara terbanyak petahana berada di tempat dia berasal yakni Togur Laok. Atas janji yang tidak dapat direalisasikan oleh petahana, membuat masyarakat Togur Laok murka dan bertekad melengserkan kepemimpinan petahana Abdul Aziz. Bagi masyarakat Togur Laok kepemimpinan Abdul Aziz saat menjabat kepala desa Sotabar tidak mampu berkontribusi besar disusun dan warganya sendiri.

Perubahan terlihat jelas ditunjukkan oleh petahana sebelum dan setelah menjabat menjadi kepala desa. Sebelum menjabat kepala desa petahana merupakan orang yang dermawan dan sesudah menjabat menjadi seorang yang tamak dan mengingkari janji yang telah disepakati dengan masyarakat Desa Sotabar. Hal ini menjadikan pemahaman masyarakat Sotabar terkait dengan kamufase untuk mendapatkan hati di depan rakyat terkait dengan pencalonan Kepala Desa 2011. Tidak hanya itu, hubungan antara botoh dan petahana semakin memanas setelah terpilihnya petahana yang diusung oleh botoh. Orientasi botoh terkait dengan keuntungan materi dan unjuk legitimasi sebagai orang berpengaruh di desa menjadikan hubungan keduanya mulai merenggang dan berubah menjadi konflik. Keduanya memiliki kekuatan yang setara, petahana sebagai kepala desa mengisi kursi pemerintahan yang bertanggung jawab penuh atas desa, sedangkan botoh memosisikan dirinya sebagai orang yang memiliki kekuasaan, kekuasaan dan pengaruh.

Ketika membicarakan hubungan masa lalu antara masyarakat dusun Togur Laok dan Lebak Timur sudah terbentuk konflik yang laten. Sedangkan untuk hubungan antara botoh dan petahana pasca dilantik terjalin cukup baik, kontrak politik sebelumnya yang telah dibuat untuk membalas jasa botoh telah terlaksana dengan cukup baik. Untuk nelayan di Togur Laok dan Rokem Barat dijanjikan akan diberikan penambahan armada kapal nelayan sejumlah 200 unit dan pemberian janji dengan

doi:

memberikan pupuk bersubsidi kepada beberapa desa yang memiliki potensi seperti di Togur Dajah, Rokem Timur dan Lebak Barat.

Hubungan antara petahana dan masyarakat yang terjalin tidak baik, mengakibatkan reputasi dari Abah Kagik selaku botoh pengusung Abdul Aziz mulai diperbincangkan masyarakat Desa Sotabar. Botoh dinilai tidak mampu mengendalikan petahana dengan bukti pengingkaran janji yang telah disepakati pemberian 200 armada laut namun yang terealisasi 86 sedangkan pemberian pupuk tidak merata dan tidak sesuai. Reputasi yang digadang-gadang akan menjadikan kemakmuran dan kesejahteraan ternyata berubah dalam realitas yang terjadi.

Dinamika Konflik Kepentingan

Konflik antara petahana dan botoh hingga saat ini berlangsung, dengan tidak dipenuhinya kapal untuk nelayan yang sejumlah 200 unit, membuat perseteruan yang terjadi semakin memanas, karena tidak ada yang mau mengalah, karena mereka berdua merasa punya kuasa dan kendali masing-masing. Seiring dengan berjalannya waktu botoh juga tidak hanya mengurus proyek Sotabar saja, petahana merasa tidak di back up secara penuh oleh Abah Kagik. Sama-sama memberikan pembenaran terkait konflik antara mereka, menurut penutupan Abah Kagik Martolo secara objektif, ia tidak menampik memang kalau dia memiliki beberapa urusan tertentu yang mengakibatkan kurangnya komunikasi dengan petahana kala itu.

Botoh merasa dikhianati oleh petahana, sebab tanpa sepengetahuannya petahana bekerja sama dengan botoh lain. Kerja sama terselubung ini diketahui Abah Kagik setelah dua tahun pemerintahan yang dipegang oleh Abdul Aziz selaku kepala desa. Merespons berita yang didapatkan botoh melalui balatternya, beliau kemudian menginstruksikan untuk tidak berpartisipasi aktif dengan kegiatan apa pun yang diselenggarakan oleh desa. Hal ini dilakukan untuk merespons kekecewaan botoh terhadap perilaku yang dilakukan oleh petahana. Kerumitan yang terjalin antara botoh dan petahana tidak lain kesulitan dalam menerjemahkan keinginan botoh yang dianggap memberatkan petahana.

Kembali mengusut konflik awal yang terjadi, dengan tidak harmonisnya komunikasi yang berlangsung antara botoh dan petahana, menjadikan solusi menjadi sulit untuk dicari. Karena menemui kemampatan, tidak satu pun mengendurkan uratnya agar bisa berdialog ulang, dan mencapai kesepakatan baru. Dengan begitu, petahana memutuskan untuk mencari botoh baru, supaya dirinya dapat ter-back up penuh hingga akhir jabatannya. Sebagai pesaing Abah Kagik Martolo, pak Khoirul Anam ini sebagai botoh baru yang dipilih oleh petahana juga memiliki strategi untuk mendapatkan kemenangan, karena ia juga mengincar kemenangan judi yang juga tidak sedikit nilainya. Pada waktu pemilihan tersebut nilai yang terkumpul dalam perjudian itu adalah 2 surat tanah milik Abah Kagik dan Khoirul Anam dan

doi:

3 kebun milik (1 milik Khoirul Anam) (2 milik Abah Kagik), menurut berita di masyarakat taruhan antar botoh mencapai 800 juta rupiah.

“Saat Pilkada Abah Kagik dan Pak Khoirul Anam mengeluarkan banyak uang untuk megebom masyarakat karena memang menginginkan kemenangan Maka dana yang digunakan pun tidak sedikit nilainya. Kalau seumpama buat dana haji yang bisa menaikkan berapa orang. Tapi setimpal dengan kemenangan yang diperoleh,” (Masyarakat Sotabar, 2017)

Botoh ingin menyelesaikan konflik antara dirinya dan petahana dengan menggulingkan petahana itu sendiri. Cara yang ditempuh botoh dalam mengakhiri kemelut konflik kepentingan pihaknya dan petahana yaitu dengan mencari kontestan baru untuk bersaing dalam pemilihan umum kepala desa 2016. Tidak main-main, botoh menjalankan aksinya dengan menyebarkan blater serta melakukan survei terhadap masyarakat Sotabar. Akhirnya muncul nama Nasikin warga Rokem Barat, yang dinilai dapat bersaing dengan petahana sebelumnya Abdul Aziz. Latar belakang Nasikin adalah seorang TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang bekerja di Malaysia sebagai mandor dan ia kerap kali mengajak warga-warga Sotabar untuk ikut bekerja bersamanya di Malaysia sebagai kuli bangunan. Nilai lebih Nasikin di mata masyarakat, ia dianggap sangat humanis dan berjiwa sosial tinggi dengan selalu bertanggung jawab atas warga Sotabar yang mengalami musibah atau kecelakaan kerja di Malaysia saat menjadi TKI. Inilah yang kemudian menjadi fondasi untuk mencalonkan Nasikin sebagai pesaing petahana. Bak gayung bersambut, Abah Kagik pun melakukan survei dengan nama Nasikin di beberapa desa Sotabar dengan dikawal oleh blater dan tim selnya. Nama Nasikin ini disetujui oleh beberapa desa, yaitu Rokem Barat, Togur Dajah, Togur Laok dan Rokem Timur. Survei yang telah dilakukan oleh botoh selanjutnya diberitahukan kepada bapak Nasikin yang memperlihatkan peta politik dan peta suara yang ada sesuai survei.

Ambisi botoh untuk menumbangkan lawan politik sangat bulat, dengan latar belakang orang biasa Pak Nasikin menyatakan kesanggupan dicalonkan sebagai figur kepala desa oleh botoh. Sebelumnya, Nasikin mengutarakan kepada botoh bahwa pihaknya tidak mampu mengeluarkan dana kampanye yang tinggi. Namun bagi Abah Kagik selaku botoh tidak ambil pusing, ia menyarankan Pak Nasikin tidak perlu mengeluarkan uang, cukup fokus untuk rakyat dan meyakinkan masyarakat untuk memilih dirinya dalam coblosan nanti. Botoh menganggap idealis seorang pemimpin harus dijaga karena ia bertanggung jawab atas kemakmuran desa. Ia harus bisa melaksanakan fungsi administratif secara benar dan melaksanakan kebijakan-kebijakan desa sesuai undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

SIMPULAN

Botoh memiliki peran penting terhadap kemenangan calon kandidat kepala desa yang diusung dalam pemilihan umum kepala desa (Pilkades) di Desa Sotabar, Kecamatan Pasean, Pamekasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran botoh dalam pilkades yaitu mensurvei data terkait untuk mendapatkan kandidat-kandidat calon kepala desa sesuai dengan keinginan masyarakat, tidak hanya itu

doi:

botoh mampu menyumbangkan dana kampanye yang cenderung tinggi dengan keuntungan yang ingin diraih setelah kemenangan, botoh memiliki strategi tersendiri untuk kemenangan calon yang diusung dengan memiliki struktur blater guna memobilisasi rancangan yang dimiliki ke masyarakat. Tidak tanggung-tanggung blater yang menjadi bawahan botoh merupakan orang penting seperti tokoh maupun kyai yang dipercaya masyarakat. Peran botoh dalam memenangkan calon kandidat kepala desa yang diusung tidak serta merta langsung dilakukan oleh botoh sendiri terkait dengan pendekatan masyarakat, terdapat blater yang mampu memobilisasi arahan yang telah dirancang oleh botoh. Sehingga, botoh merupakan struktur teratas dalam menjalankan praktik percontohan di pilkades.

Peran botoh tidak berjalan dengan mudahnya, terdapat dinamika-dinamika yang menghiasi praktik yang dijalankan. Proses dinamika botoh ditandai dengan adanya hubungan antara botoh, petahana dan masyarakat yang berkonflik. Konflik antara masyarakat dan petahana terkait dengan janji palsu yang telah didapatkan masyarakat dari petahana. Kejadian ini terkait dengan kepercayaan masyarakat yang sudah tidak ada terhadap petahana. Selain itu, hubungan antar petahana dan botoh terdapat konflik yang diakibatkan oleh perebutan kekuasaan. petahana merasa mendapatkan kekuasaan yang tidak seimbang dari adanya perjanjian politik dengan botoh setelah kemenangan yang didapatkan pada pilkades sebelumnya. Relevansi konflik menunjukkan sebuah pertarungan kepentingan antara kedua belah pihak yang saling bersengketa untuk mendapatkan sumber daya. Kedua belah pihak konflik mampu membuktikan kekuasaan yang dimiliki dengan memenangkan kembali kandidat yang dicalonkan. Selain itu, mobilisasi politik botoh diakibatkan dari gerakan kemenangan calon kandidat kepala desa yang diusung botoh guna sesuai dengan keinginan botoh.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E. (2014). When brokers betray: Clientelism, social networks, and electoral politics in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 46(4), 545-570.
- Aspinall, E. (Ed.). (2015). *Politik uang di Indonesia: Patronase dan klientelisme pada pemilu legislatif 2014*. Research Centre for Politics and Government, Department of Politics & Government, Fisipol UGM.
- Aspinall, E., & Rohman, N. (2017). Village head elections in Java: Money politics and brokerage in the remaking of Indonesia's rural elite. *Journal of Southeast Asian Studies*, 48(1), 31-52.
- Aspinall, E., Rohman, N., Hamdi, A. Z., & Triantini, Z. E. (2017). Vote buying in Indonesia: Candidate strategies, market logic and effectiveness. *Journal of East Asian Studies*, 17(1), 1-27.
- Carty, R. K. (1981). Brokerage and partisanship: politicians, parties and elections in Ireland. *Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique*, 14(1), 53-81.
- Hamdani, R. (2016). Pebotoh di Tengah Pemilihan Umum Pulau Jawa. Rodablog. <http://roda2blog.com/2015/12/12>
- Kartohadikoesoemo, S. (1984). *Desa*. Yogyakarta.
- Nasikun. (1994). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pruit, D. G., & Rubin, J. Z. (2004). *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

doi:

- Rahmawati. (2016). Peluang Poltik Uang Dalam Pemiligan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Roniger, L. (1987). Caciquismo and Coronelismo: contextual dimensions of patron brokerage in México and Brazil. *Latin American Research Review*, 22(2), 71-99.
- Sari, D. K. (2017). Strategi mobilisasi gerakan masyarakat dalam penutupan industri pengelolaan limbah B3 di Desa Lakardowo Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Politik Indonesia*, 2(1), 127-134.
- Setiawan, A. (2016). Mantan Pebotoh Ungkap Sulitnya Endus Bursa Taruhan Pilkadaes. Joglosemar. <http://joglosemar.co/2016/11/mantan-pebotoh-ungkap-sulitnya-endus-bursa-taruhan-pilkades.html>
- Suharman, J. (2015). Suasana Politik di Tingkat Pemilihan Umum [UMY]. thesis.umy.ac.id/datapublik/t46860.pdf
- Surbakti, R. (2010). *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo Indonesia.